

## **Analisis Bibliometrik Kasus Korupsi Pelaksanaan APBD**

Fatma Yunita Aprilia<sup>1</sup>, Safiah Allisa<sup>2</sup>, Dewi Suryanita Pratiwi<sup>3</sup>, Luluk Desva Fitriah<sup>4</sup>, Mirna Mendrofa<sup>5</sup>,  
Ajeng Puspa Wardani<sup>6</sup>, Indrawati Yuhertiana<sup>7</sup>, Acynthia Ayu Wilasittha<sup>8</sup>

1,2,3,4,7,8 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

5,6 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail: acynthia.ayu.ak@upnjatim.ac.id

---

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alur penelitian korupsi pada pelaksanaan APBD secara sistematis. APBD merupakan bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan untuk masyarakat. Pada hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat penyalahgunaan APBD paling banyak digunakan oleh kepala daerah. Penelitian ini menggunakan data bibliography yang dikumpulkan menggunakan aplikasi Publish or Perish 8 dengan website google scholar sebagai database pengambilan data. Data dianalisis menggunakan metode bibliometrik dengan menggunakan aplikasi VOSviewer. Berdasarkan hasil analisis agregasi bibliografi menggunakan VOS Viewer dapat dikelompokkan menjadi lima klaster. Didapatkan hasil hubungan antara pelaksanaan APBD dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat daerah, hubungan antara pelaksanaan APBD di sektor publik dengan pejabat pelaksana dana APBD, hubungan tindakan nepotisme terhadap dana desa atau APBD di suatu daerah, hubungan antara publik di Indonesia dengan pejabat publik yang korupsi, dan hubungan pengawasan DPRD terhadap dana APBD.*

*Kata Kunci: Pelaksanaan APBD, Dana Desa, Korupsi.*

---

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art57](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art57)

### **PENDAHULUAN**

APBD sebagai bentuk kepercayaan masyarakat pada pemerintah melalui DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat. APBD juga termasuk rencana keuangan setiap tahun pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada pelaksanaan APBD dalam menghindari penyimpanan dan penyelewengan anggaran memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Pengelolaan keuangan dan anggaran daerah merupakan aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati dan memerlukan banyak pertimbangan Mardiasmo (1999: 11). Anggaran yang telah di rencanakan dalam APBD suatu daerah merupakan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan, pembangunan dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah mencerminkan berapapun nilai pendapatan dan belanja daerah yang akan dikeluarkan. Perencanaan dana APBD digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah, alat otoritas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, dan sebagai alat koordinasi bagi semua unit kerja di pemerintah daerah (Susetyo, 2008).

Kriminolog Noach berpendapat bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan yang tidak bisa hilang. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas secara serius meski tidak mudah. Hal ini sependapat dengan kriminolog Frank Tanembaun yang berpendapat: kejahatan adalah abadi, seabadi masyarakat (Badjuri, 2011).

Penyelewengan dana APBD dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW. Dana APBD paling banyak disalahgunakan oleh kepala daerah. Penyalahgunaan APBD oleh kepala daerah didominasi dengan kegiatan perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, mutasi pejabat daerah,

promosi jabatan, pengelolaan aset milik daerah, dan lain-lain. Berdasarkan (Setiyowati&Ispriyarso, 2019) kasus korupsi penyalahgunaan APBD pada tahun 2017 mencapai 154 kasus sehingga merugikan negara senilai RP 1,2 Triliun.

Salah satu cara untuk mencegah atau bahkan memberantas korupsi daerah dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk mengelola secara tertib, patuh, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD, yang rentan terhadap gangguan oleh pejabat publik yang berkuasa. Memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kepentingan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iskandar, 2018).

Pelaksanaan APBD tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD serta juga pada Pasal 42 C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. DPRD melakukan supervisi terhadap pelaksanaan APBD buat memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di termin perencanaan, termin aplikasi APBD, serta termin akuntabilitas. pada penganggaran sektor publik, proses aplikasi APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) yang sebagai pedoman ialah Keputusan Menteri dalam Negeri angka 29 Tahun 2002 wacana panduan Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan supervisi Keuangan wilayah dan Penyusunan Pendapatan asli daerah. serta aturan belanja, pelaksanaan rapikan kelola istiadat penyelenggaraan keuangan wilayah dan penyusunan perhitungan aturan pendapatan dan belanja daerah. oleh sebab itu, informasi korupsi dalam pelaksanaan APBD menjadi penting sebab bertujuan buat mengetahui, menggunakan mempelajari aneka macam penelitian sebelumnya terkait anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), penyelewengan dana pada pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) berujung di duduk perkara kesenjangan korupsi.

## TINJAUAN LITERATUR

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang korupsi dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Iskandar (2018) mengkaji bahwa tindakan Negara dalam memberantas praktik korupsi di daerah dilakukan dengan cara pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh orang yang berbeda baik dari internal maupun eksternal. Dengan adanya koordinasi dan integrasi, maka korupsi dapat diminimalisir hingga diberantas sehingga tidak akan ada celah yang akan merugikan keuangan daerah.

Terdapat analisis bibliometrik yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan korupsi antara lain sebagai berikut. Studi yang dilakukan oleh Bahoo (2020) membahas mengenai korupsi pada sektor perbankan. Hasil tinjauan bibliometrik terdapat 819 artikel dari tahun 1969 sampai 2019, tentang korupsi di bank yang berasal dari database ISI web of Knowledge. Pada analisis tersebut dapat mengidentifikasi enam aliran penelitian. Pada studi Quoc Bui et al. (2021) membahas tentang perkembangan di bidang penelitian korupsi yang dilakukan oleh para sarjana yang berafiliasi di salah satu negara ASEAN. Jumlah kumpulan publikasi sebanyak 631 artikel selama tahun 2000-2020. Pencarian dilakukan pada database jurnal yang terindeks Scopus yang menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan terutama selama periode 2011-2020 yaitu sebesar 85,6% dari koleksi publikasi.

Sementara itu, studi dari Bermeo-Giraldo et al. (2021) yang membahas mengenai fraud akuntansi pada organisasi menyimpulkan bahwa fraud telah menjadi kejahatan besar bagi ekonomi, masyarakat, dan perusahaan karena dampak yang ditimbulkannya. Analisis menggunakan 394 penulis dan 246 publikasi ilmiah pada tahun 1978-2019. Studi oleh Bahoo, Alon, & Paltrinieri (2020) membahas tentang korupsi dalam bisnis internasional. Didapat 137 artikel yang digunakan antara tahun 1992 sampai 2019. Selain itu, analisis tersebut mengidentifikasi tujuh aliran penelitian. Studi pada Zhai et al. (2021) dengan topik mengenai korupsi pada proyek konstruksi dengan menggunakan CiteSpace yang menganalisis 542 studi yang diambil dari Web of Science yang diterbitkan dari tahun 2000 hingga 2020.

Studi dari Rezzoagli et al. (2021) dengan topik korupsi dan privatisasi. Data yang digunakan mulai tahun 2008 sampai tahun 2019 dengan 318 artikel diidentifikasi dimana 98 di antaranya dianalisis. Moisé (2020) juga menggunakan analisis bibliometrik dengan topik korupsi di sektor minyak dengan menganalisis 184 artikel penelitian yang terindeks pada Web of Science, Scopus dan Google Scholar. Studi dengan tema korupsi pada disiplin ilmu ekonomi yang dianalisis menggunakan 4.488 artikel pada tahun 1968-2019 yang berasal dari database ISI web of knowledge dilakukan oleh Bahoo, Alon, & Floreani (2020) yang mengidentifikasi tujuh aliran penelitian. Selain itu, juga mengidentifikasi jurnal utama, artikel, negara, institusi, penulis, sumber data, pengukuran, kerangka teori, dan jaringan yang menangani permasalahan.

Artikel ini merupakan replikasi dari penelitian Farikhoh & Chariri (2022) yang menggunakan analisis bibliometrik dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Database bersumber dari jurnal yang terindeks scopus dan diperoleh 759 artikel. Software VOSviewer versi 1.6.17. digunakan dalam analisis ini. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara internasional, korupsi sektor publik adalah topik yang menarik. Hal – hal yang menjadi ketidaksamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain periode tahun artikel, database yang digunakan bersumber dari google scholar, serta kata kunci yang digunakan. Topik korupsi pada pelaksanaan APBD penting diangkat dengan menggunakan kata kunci “pelaksanaan APBD”, “dana desa” dan “korupsi” karena bertujuan untuk mengetahui studi analisis bibliometrik. Selain itu, masih banyaknya keterbatasan – keterbatasan pada penelitian terdahulu serta terdapat fenomena yang berkaitan dengan korupsi pada pelaksanaan APBD.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis alur penelitian korupsi pada pelaksanaan APBD secara sistematis. Kedua, menganalisis perkembangan penelitian pada korupsi pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun, kata kunci spesifik, serta penulis. Ketiga, menganalisis secara sistematis korupsi yang terjadi berbagai negara di dunia yang tentunya terdapat kesenjangan penelitian, tren, dan pola penelitian terdahulu. Dengan adanya studi kasus korupsi yang terjadi di negara lain tentunya dapat dijadikan contoh pengembangan strategi pencegahan dan pemberantasan yang bisa dipakai di negara Indonesia. Keempat, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data bibliography yang dikumpulkan menggunakan aplikasi Publish or Perish 8 dengan website google scholar sebagai database pengambilan data. Google scholar digunakan dengan pertimbangan kemudahan akses serta menampilkan hasil yang lebih banyak daripada website lain. Artikel yang dikumpulkan adalah artikel terbitan tahun 2018 hingga 2022 dengan kata kunci “pelaksanaan APBD” dan “korupsi”. Dari pencarian kata kunci tersebut dihasilkan 996 artikel yang kemudian disimpan dalam format .ris.

Data yang disimpan dalam format .ris kemudian dianalisis menggunakan metode bibliometrik dengan menggunakan aplikasi VOSviewer 1.6.18. VOSviewer digunakan dalam penelitian ini karena aplikasi tersebut dapat menganalisis hubungan garis antar unit yang berbeda. VOSviewer dapat mengubah data menjadi peta jaringan serta mendukung berbagai jenis format file. Analisis jaringan bibliometrik dilakukan dengan dua metrik yaitu Citations dan Co-Occurrence of Author's Specific Keyword. Minimal sitasi adalah nol sehingga semua dokumen dapat memenuhi ambang batas. Parameter visualisasi yang digunakan adalah 1,00; ukuran variasi label lingkaran yang digunakan adalah 0,50; panjang maksimal yang digunakan adalah 30; ukuran variasi garis 0,50 dengan minimal strength adalah 0 dan maksimal garis adalah 1000.

## HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan publikasi “Korupsi Pelaksanaan APBD” tahun 2018-2022 yang tersaji pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Perkembangan Publikasi "Korupsi Pelaksanaan APBD" 2018-2022

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2018 hingga 2022 publikasi artikel yang membahas mengenai korupsi penggunaan dana APBD mengalami perubahan di setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa topik tersebut relevan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

**Tabel 1.** Peringkat Penulis Berdasarkan Google Scholar Ranking

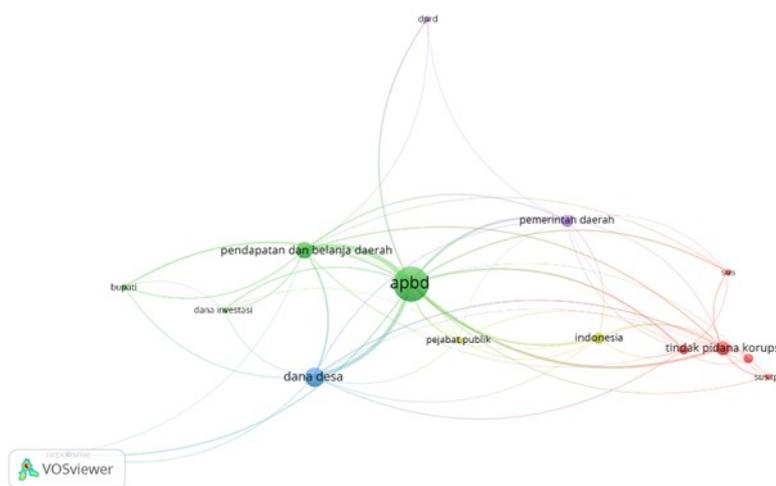
GS Rank	Penulis	Judul
1	W Halim	Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit
2	A Mufida	Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19
3	B Halawa, DS Barus, TM Butar-Butar, SA Batubara	Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pakpak Bharat
4	L Launa, H Lusianawati	Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19
5	Y Kumombong	Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah
6	AGA Mulyadi	Analisis Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten
7	E Maria, A Halim, E Suwardi, S Miharjo	Desentralisasi Fiskal Dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris Dari Indonesia
8	Y Prianto, M Marian, S Stella	Penyalahgunaan APBD Oleh Para Pejabat Publik Saat Pandemi Covid-19
9	E Ubwarin, AR Makaruku	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
10	DS Putra, R Ginting	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun antara 2018-2022 beberapa peneliti telah memilih topik mengenai “Korupsi Pelaksanaan APBD”. Pemilihan topik ini relevan karena dalam kurun waktu tersebut, Indonesia sedang dalam kondisi darurat melawan pandemi Covid-19. Para

peneliti tentu saja ingin mengetahui perubahan sejauh mana tingkat tindak pidana korupsi pelaksanaan APBD saat Indonesia dilanda pandemi. Hal tersebut terbukti dari Gambar 1 yang menunjukkan grafik sempat meningkat terhadap korupsi dengan penggunaan dana APBD selama 2018-2022.

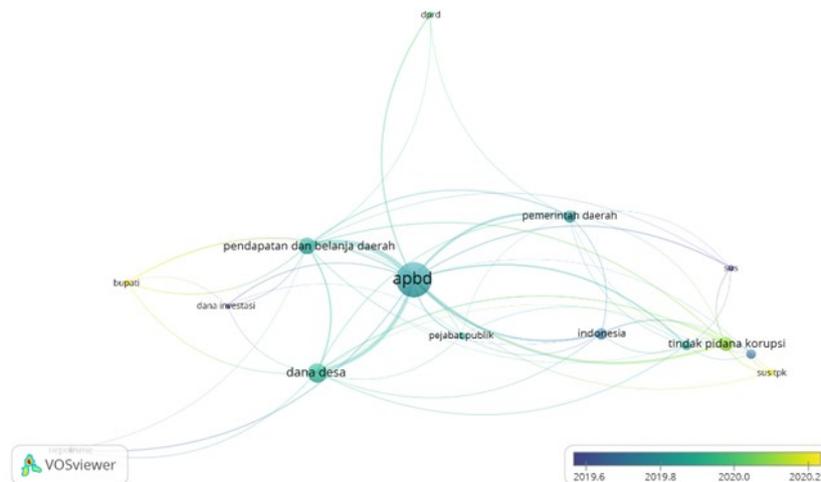
Berdasarkan database Google Scholar yang telah dikumpulkan melalui tools VOS Viewers, artikel tentang penyelewengan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) di sektor publik dengan rentang tahun 2018 hingga 2022 telah ditelaah yaitu sebanyak 996 artikel yang telah diterbitkan.

Hasil analisis agregasi bibliografi menggunakan VOS Viewer dapat dikelompokkan menjadi lima klaster. Klaster 1: klaster ini menunjukkan hubungan antara pelaksanaan dana APBD dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Klaster 2: Klaster ini menunjukkan hubungan antara pelaksanaan APBD di sektor publik dengan pejabat pelaksana dana APBD di suatu wilayah. Klaster 2 berwarna hijau. Klaster 3: Klaster ini menunjukkan hubungan antara tindakan nepotisme terhadap dana desa atau APBD di suatu daerah. Klaster 3 berwarna biru. Klaster 4: Klaster ini menunjukkan hubungan antara sektor publik di Indonesia dengan pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Klaster 4 berwarna kuning. Klaster 5: Klaster ini menunjukkan hubungan antara pengawas DPRD terhadap dana APBD. Klaster 5 berwarna ungu.



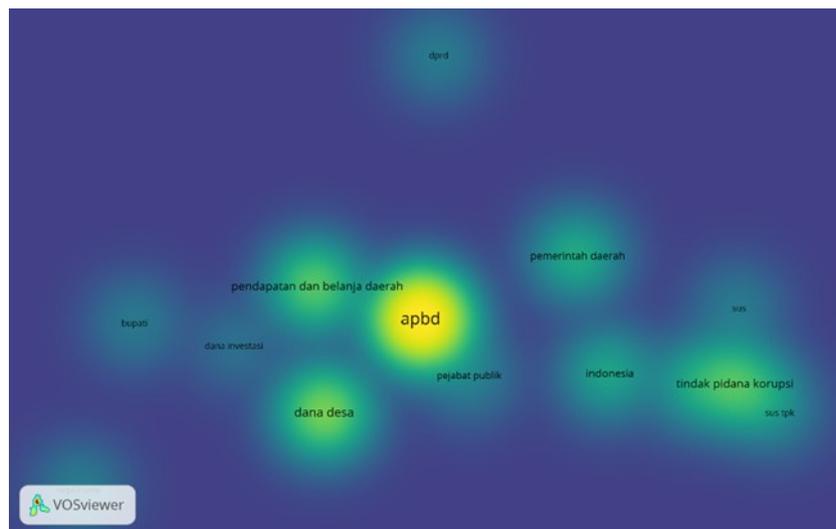
**Gambar 2.** Kemunculan Kata Kunci Spesifik

Gambar 2 menunjukkan bahwa “APBD” merupakan konsep yang dipelajari secara luas dan diikuti dengan adanya tindakan korupsi. Istilah korupsi muncul sebagai kata kunci kedua yang paling banyak digunakan dalam suatu penelitian. Analisis menghasilkan sebanyak 15 kata kunci yang dikelompokkan menjadi 5 klaster. Setiap klaster diwakili oleh warna yang berbeda dengan total kekuatan tautan sebesar 119. Analisis kata kunci yang dihasilkan yaitu 1) pelaksanaan APBD di daerah masih belum terimplementasi dengan baik, 2) kata kunci korupsi selalu berhubungan dengan penggunaan dana APBD, pemerintah daerah, dan sektor publik di Indonesia, 3) DPRD kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD.



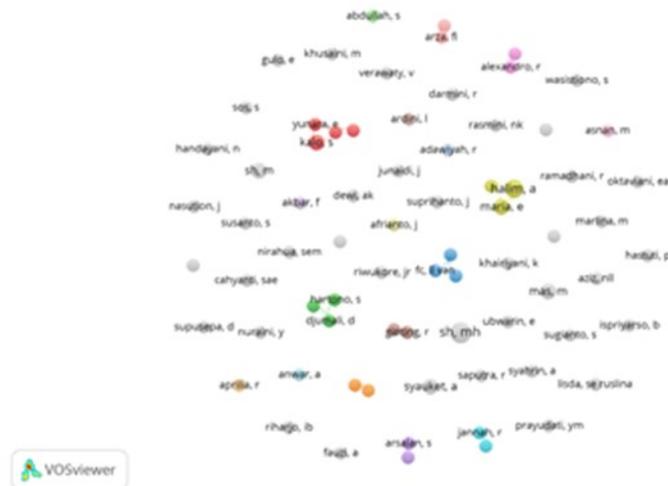
**Gambar 3.** Overlay visualization

Berdasarkan hasil analisis overlay visualization VOS Viewer pada Gambar 3 dari rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 penelitian yang paling banyak dilakukan yaitu terkait implementasi APBD di suatu daerah dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat setempat atau pengelola dana APBD.



**Gambar 4.** Density visualization

Kata kunci yang dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut tercermin dalam visualisasi density VOS Viewer. Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa kata-kata yang diwakili dalam warna hijau pudar dengan ukuran yang lebih kecil menunjukkan bahwa istilah tersebut belum banyak yang dipelajari atau dilakukan penelitian, seperti kata-kata nepotisme, dana desa dan dana investasi, bupati atau pejabat daerah, DPRD, dan sektor publik lainnya di Indonesia. Sementara itu, hasil analisis yang divisualisasikan dari Gambar 5 menghasilkan total 74 penulis yang dikelompokkan ke dalam 20 klaster dan diwakili oleh warna yang berbeda.



**Gambar 5.** Sitasi

Penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memuat jumlah yang dianggarkan untuk belanja dan pembiayaan dengan dana yang besar di suatu daerah dapat memicu tindak pidana korupsi. Kemampuan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Semakin besar dana yang digelontorkan untuk APBD, semakin besar pula dana yang dapat mereka korupsi. Namun, penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dirasa sudah tidak efektif lagi. Pejabat pemerintah saling terlibat dalam korupsi baik pejabat legislatif maupun pejabat eksekutif. Oleh karena itu, penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi belum cukup efektif (Rinjani, 2020). Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang ada belum dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Bustanul Arifin). Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi akan kesadaran masyarakat.

Menurut pendapat (Said, 2011) anggota DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menganut ajaran positivisme-legalistik dengan falsafah liberalisme, individualisme dan rasionalisme. Oleh karena itu, jatuhnya keputusan mengakibatkan putusan yang berbeda sehingga tidak dapat dipertahankan. Kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo diselenggarakan menggunakan tiga prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi (Setyagama, 2019). Sementara itu, dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, pemerintah menggunakan pencegahan keterbukaan penggunaan alokasi Dana Desa, akuntabilitas penggunaan alokasi Dana Desa, dan penerapan Good Governance.

## SIMPULAN

Pada software VOS Viewers dengan database dari Google Scholar didapatkan artikel mengenai penyelewengan dana APBD dari tahun 2018-2022 sebanyak 996 telah diterbitkan. Dari hasil analisis agregasi bibliografi menggunakan VOS Viewer di hasil 5 klaster meliputi Klaster 1 menunjukkan hubungan antara pelaksanaan dana APBD dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Klaster 2 berwarna hijau menunjukkan hubungan antara pelaksanaan APBD di sektor publik dengan pejabat pelaksana dana APBD di suatu wilayah Klaster 3 berwarna biru menunjukkan hubungan antara tindakan nepotisme terhadap dana desa atau APBD di suatu daerah. Klaster 4 berwarna kuning menunjukkan hubungan antara sektor publik di Indonesia dengan pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Klaster 5 berwarna ungu menunjukkan hubungan antara pengawasan DPRD terhadap dana APBD. Dari setiap klaster didapatkan analisis kata kunci dihasilkan yaitu 1) pelaksanaan APBD di daerah masih belum terimplementasi dengan baik, 2) kata kunci korupsi selalu berhubungan dengan

penggunaan dana APBD, pemerintah daerah, dan sektor publik di Indonesia, 3) DRPD kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD.

Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia perlu diperhatikan agar anggota legislatif daerah dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum di daerah. Dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, pemerintah menggunakan pencegahan keterbukaan penggunaan alokasi Dana Desa, akuntabilitas penggunaan alokasi Dana Desa, dan penerapan Good Governance. Masyarakat juga patut berpartisipasi pada pengaduan pertanda korupsi. Termasuk pada pengawalan Pengelolaan dana desa di masing-masing desa Kabupaten sebagai pencegahan dini tindak pidana korupsi dana desa dan lebih menyampaikan rasa nyaman para pelaksana aktivitas dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. Saran buat peneliti selanjutnya dapat menyebarkan database pengambilan data agar mendapatkan literature review yang lebih luas dan menerima yang akan terjadi analisis lebih rinci.

## DAFTAR REFERENSI

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 84-96.
- Bahoo, S. (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. *Finance Research Letters*, 35(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101499>
- Bahoo, S., Alon, I., & Floreani, J. (2020). Corruption in economics: a bibliometric analysis and research agenda. *Applied Economics Letters*, 28(7), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1764476>
- Bahoo, S., Alon, I., & Paltrinieri, A. (2020). Corruption in international business: A review and research agenda. *International Business Review*, 29(4), 101660. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101660>
- Bermeo-Giraldo, M. C., Grajales-Gaviria, D., Valencia-Arias, A., & Palacios-Moya, L. (2021). Evolution of scientific production on accounting fraud in organizations: Bibliometric analysis. *Estudios Gerenciales*, 37(160), 492–505. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.160.4000>
- Farikhoh, I., & Chariri, A. (2022). A bibliometric analysis of corruption in the public sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 63–76. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas@KomisiPemberantasanKorupsi10.32697/integritas.v8i1.866>
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN : JURNAL PENELITIAN*, 97-109.
- Iskandar, D. (2018). Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah: Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(2), 177–191.
- Karmani, E. H. (2019). Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak PIDANA KORUPSI DANA DESA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 199-210.
- K, K. P. (2018). Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. *Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 63–76.
- M, A. G. (2022). Analisis terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten. 732-736.
- Moisé, G. M. (2020). Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature. *Extractive Industries and Society*, 7(1), 217–236. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002>
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur dan Skema Pengendalian Internal terhadap Antisipasi Korupsi Berjamaah dalam Pelaksanaan APBD dengan Integritas sebagai Variabel Moderating. 4(3), 464–476.
- Quoc Bui, D., Tien Bui, S., Kim Thi Le, N., Mai Nguyen, L., The Dau, T., & Tran, T. (2021). Two decades of corruption research in ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000–2020). *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2006520>
- Rezzoagli, B., da Cunha Panis, A., Granja Cançado, J. P., & Celis León, A. J. (2021). Privatización y corrupción: una revisión sistemática de la literatura. *Política y Sociedad*, 58(1), e65281–e65281. <https://doi.org/10.5209/poso.65281>

- Rinjani, D. M. (2020). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA MASSAL ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 69-77.
- Said, N. A. (2011). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakpidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD. *Jurnal Dinamika Hukum*, 136-149.
- Santoso, Marzuki, N. P. (2021). ANALISIS KRIMINOLOGI KORUPSI ANGGOTA DPRD SUMUT TERKAIT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3, 638–650.
- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 205-265.
- Setyagama, A. (2019). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal IUS*, 86-96.
- Susetyo, D. (2008). Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 39-53.
- Wimmy, H., & Dwiranda, I. F. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), 39–53.
- Zhai, Z., Shan, M., Darko, A., & Chan, A. P. C. (2021). Corruption in construction projects: Bibliometric analysis of global research. *Sustainability (Switzerland)*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/su13084400>